
Analisis Framing Media CNN Indonesia dan Inilah.com dalam Pemberitaan Menkeu Purbaya yang Tidak Melegalkan Thrifting

Komang Juliani¹, Rieka Yulita Widawara², Ida Bagus Made Arjana³

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi Hindu, Dharma Duta, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Kota Mataram, Indonesia

Email: ¹julianik553@gmail.com, ²riekawidawara@gmail.com, ³ibmarjana@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze how CNNIndonesia.com and Inilah.com frame the controversy surrounding the government's prohibition of thrifting led by Finance Minister Purbaya using Entman's framing analysis model. The thrifting issue has gained public attention due to its connection with the legality of second-hand clothing imports, the livelihood of local traders, and the interests of the domestic textile industry. The study examines six news articles—three from CNN Indonesia and three from Inilah.com—through Entman's four framing elements: problem definition, causal diagnosis, moral evaluation, and treatment recommendation. The findings reveal substantial differences between the two media outlets. CNN Indonesia tends to construct thrifting as a multilayered socio-economic issue, featuring diverse actors such as traders, legislators, and government officials, thus producing a more dialogical and contextual narrative. In contrast, Inilah.com emphasizes a firmer stance by highlighting the illegality of thrifting, the government's strong enforcement actions, and the urgency of eradicating smuggling networks. These contrasting constructions reflect each outlet's editorial orientation and targeted audience. The study underscores the importance of media literacy in helping the public critically interpret framing differences, particularly within economic and public-policy issues that significantly influence societal perception.

Keywords: Entman, Framing Analysis, Media, News Coverage, Thrifting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana CNNIndonesia.com dan Inilah.com membongkar isu pelarangan thrifting oleh Menteri Keuangan Purbaya melalui pendekatan analisis framing model Entman. Isu thrifting menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan legalitas impor pakaian bekas, keberlangsungan ekonomi masyarakat, serta kepentingan industri tekstil nasional. Data penelitian terdiri dari enam artikel berita tiga dari CNN Indonesia dan tiga dari Inilah.com yang dianalisis dengan empat elemen framing Entman: pendefinisian masalah, diagnosa penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang menonjol antara kedua media. CNN Indonesia cenderung menyajikan isu thrifting sebagai persoalan yang kompleks dan berlapis, dengan menampilkan beragam aktor seperti pedagang, legislator, dan pemerintah sehingga menciptakan narasi yang lebih dialogis dan kontekstual. Sebaliknya, Inilah.com menonjolkan perspektif yang lebih tegas dan menekankan sisi ilegalitas thrifting melalui fokus pada tindakan keras pemerintah,

pemberantasan mafia, dan urgensi penegakan hukum. Perbedaan konstruksi realitas tersebut mencerminkan orientasi redaksional dan karakter audiens masing-masing media. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi media agar publik mampu memahami perbedaan framing dalam pemberitaan, terutama pada isu ekonomi dan kebijakan publik yang sensitif terhadap persepsi masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Framing, Entman, Media Online, Pemberitaan, Thrifting

PENDAHULUAN

Perkembangan praktik thrifting sebagai bentuk jual beli pakaian bekas impor telah menjadi fenomena sosial-ekonomi yang semakin menonjol di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Lestari et al., 2024). Aktivitas ini tidak hanya melibatkan konsumen muda, tetapi juga pedagang kecil yang menjadikannya sebagai sumber penghidupan utama. Di sisi lain, peredaran pakaian bekas impor telah lama dinyatakan ilegal dalam regulasi perdagangan nasional karena dinilai berpotensi mengganggu industri tekstil dalam negeri, mengandung risiko kesehatan, serta membuka ruang bagi praktik penyelundupan barang dari luar negeri (Mansyurin & Apriani, 2024). Ketegangan antara popularitas thrifting dan kerangka hukum yang melarangnya mencapai eskalasi baru ketika Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan sikap tegas bahwa pemerintah tidak akan melegalkan praktik thrifting dengan alasan apa pun, termasuk melalui pembayaran pajak oleh pedagang. Pernyataan ini kemudian berkembang menjadi isu publik yang luas dan memicu dinamika pemberitaan intensif di media daring.

Media massa memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman publik terhadap isu thrifting dan kebijakan pemerintah tersebut. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif mengonstruksi realitas melalui proses seleksi, penonjolan, dan penafsiran terhadap peristiwa (Syafitri, 2025). Dalam konteks ini, framing menjadi mekanisme penting yang menentukan bagaimana sebuah isu dipersepsikan masyarakat. Model framing Entman menjelaskan bahwa media membingkai realitas dengan mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, dan merekomendasikan solusi tertentu (Entman, 1993). Perbedaan framing antar media berpotensi menghasilkan pemaknaan yang beragam, apakah thrifting diposisikan sebagai persoalan hukum yang harus diberantas, sebagai praktik ekonomi rakyat yang perlu dilindungi, atau sebagai fenomena yang menuntut pendekatan kebijakan yang lebih kompromistis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemberitaan thrifting dalam perspektif media dan kebijakan. Salah satunya adalah penelitian berjudul Analisis Framing Pemberitaan Larangan Thrifting pada Media Batampos.co.id dan Batamnews.co.id (Builalaq & Abidin, 2022), yang menelaah bagaimana dua media lokal di Batam membingkai kebijakan larangan impor pakaian bekas. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media lokal berperan penting dalam membentuk narasi kebijakan yang kontroversial di tingkat daerah, terutama dalam konteks ekonomi lokal dan kepentingan masyarakat setempat. Meskipun relevan, penelitian tersebut berfokus pada media lokal dan tidak secara spesifik menelaah bagaimana kebijakan menteri sebagai aktor nasional dikonstruksi dalam pemberitaan media berskala nasional dengan orientasi redaksional yang berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat celah penelitian yang belum banyak dikaji, yaitu bagaimana media nasional dengan karakter dan ideologi redaksional yang berbeda membingkai pernyataan dan kebijakan seorang menteri secara spesifik. Perbandingan antara CNN Indonesia dan Inilah.com menjadi penting secara akademis karena keduanya sama-sama media nasional yang intens memberitakan isu ekonomi-politik, namun memiliki gaya penyajian, penekanan nilai, dan orientasi framing yang berbeda. CNN Indonesia cenderung menampilkan pemberitaan dalam kerangka institusional dan dialog

kebijakan, sedangkan Inilah.com lebih menonjolkan aspek konflik, ketegasan negara, dan penegakan hukum. Perbedaan ini memungkinkan munculnya konstruksi makna yang kontras terhadap isu thrifting dan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana CNN Indonesia dan Inilah.com membingkai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya mengenai penolakan legalisasi thrifting dengan menggunakan model framing Entman. Dengan menganalisis enam artikel yang terdiri dari tiga artikel masing-masing media, penelitian ini berupaya mengungkap perbedaan dalam pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi yang disampaikan kepada publik. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian mengenai framing kebijakan menteri dalam isu ekonomi rakyat, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan studi komunikasi, khususnya dalam konteks relasi media, kebijakan publik, dan konstruksi realitas di media digital Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Framing

Framing merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana media membentuk realitas dengan menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa sehingga aspek tersebut menjadi pusat perhatian audiens. (Entman, 1993) menyatakan bahwa framing bekerja melalui empat elemen utama, yaitu mendefinisikan masalah, menegaskan penyebab masalah, membuat penilaian moral, dan merekomendasikan penanganan. Keempat elemen ini membentuk struktur makna dalam sebuah berita dan memengaruhi cara khalayak memahami isu yang disajikan media. Dengan demikian, framing tidak hanya berkaitan dengan apa yang diberitakan, tetapi juga bagaimana peristiwa tersebut diinterpretasikan dan diarahkan maknanya.

Model framing Entman banyak digunakan untuk menganalisis isu politik, hukum, dan ekonomi karena kemampuannya mengungkap proses seleksi dan penonjolan informasi dalam pemberitaan (Andini et al., 2025). Pilihan diksi, narasumber, fokus masalah, serta orientasi solusi menjadi unsur penting dalam membentuk bingkai berita. Melalui analisis framing, peneliti dapat mengidentifikasi kecenderungan media dalam mengonstruksi realitas sosial, termasuk potensi bias, keberpihakan, atau kepentingan tertentu yang melatarbelakangi produksi berita.

Dalam konteks ekonomi politik media, framing tidak dapat dilepaskan dari struktur kepemilikan, orientasi bisnis, serta kepentingan ekonomi media. Media sebagai institusi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai entitas ekonomi yang bergantung pada iklan, audiens, dan relasi dengan kekuasaan. Oleh karena itu, framing dapat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan ideologis media, termasuk dalam membingkai isu legalitas impor dan perlindungan industri domestik. Perspektif ekonomi politik media membantu menjelaskan bahwa cara media membingkai kebijakan thrifting tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan jurnalistik, tetapi juga oleh kepentingan struktural yang melingkupi praktik produksi berita.

Media Online

Media online merupakan bentuk media massa yang memanfaatkan internet sebagai saluran utama dalam produksi dan distribusi informasi. Karakteristik media online meliputi kecepatan, aktualitas, interaktivitas, fleksibilitas, serta kemampuan memperbarui informasi secara real time (Pamuji, 2019). Transformasi digital telah mengubah praktik jurnalisme, mulai dari proses peliputan hingga penyajian berita, yang kini dituntut untuk lebih singkat, menarik, dan mudah dikonsumsi oleh pembaca (Dhinanti et al., 2024).

Dalam praktiknya, media online juga beroperasi dalam logika ekonomi digital yang ditandai oleh persaingan trafik, clickbait, dan algoritma distribusi konten (Farhanudin et al., 2025). Kondisi ini mendorong media untuk menyajikan isu dengan sudut pandang tertentu yang dianggap mampu menarik perhatian publik. Dari sudut pandang ekonomi politik media, orientasi bisnis dan segmentasi audiens dapat memengaruhi bagaimana suatu isu dibingkai. Media yang memiliki kedekatan dengan kepentingan kebijakan atau negara cenderung menampilkan framing yang sejalan dengan narasi stabilitas dan ketertiban, sementara media yang berorientasi populer dapat menonjolkan konflik, kontroversi, atau dampak sosial dari kebijakan tersebut.

Berita

Berita merupakan laporan mengenai peristiwa yang dianggap penting, aktual, dan layak diketahui publik. Namun, berita bukanlah representasi objektif dari realitas, melainkan hasil konstruksi sosial yang melalui proses seleksi, penonjolan, dan interpretasi (Irawan, 2023). Dalam produksi berita, jurnalis dan redaksi menentukan sudut pandang, memilih narasumber, serta menyusun struktur naratif yang secara tidak langsung membingkai makna suatu peristiwa (Ketindan, 2025).

Dalam media online, konstruksi berita semakin dipengaruhi oleh format digital seperti judul singkat, paragraf padat, serta penggunaan visual dan hyperlink (Ikhwan, 2022). Elemen-elemen tersebut tidak bersifat netral, melainkan berpotensi memperkuat frame tertentu. Dengan demikian, framing berita di media online menjadi semakin signifikan karena mampu membentuk persepsi publik secara cepat dan luas.

Keterkaitan Antar Konsep dan Perspektif Ekonomi Politik Media

Analisis framing Entman sangat relevan untuk diterapkan pada berita media online karena keduanya berkaitan erat dengan proses konstruksi makna. Media online, yang beroperasi dalam ekosistem digital dan logika pasar, memiliki kecenderungan kuat untuk menonjolkan aspek tertentu dari sebuah isu sesuai dengan orientasi redaksi dan kepentingan institusionalnya. Dalam perspektif ekonomi politik media, framing dipahami sebagai hasil interaksi antara praktik jurnalistik dan struktur kekuasaan ekonomi yang melingkupi media.

Isu legalitas thrifting dan penolakan impor pakaian bekas merupakan isu ekonomi-politik yang menyentuh kepentingan negara, industri domestik, dan kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, framing media terhadap isu ini tidak dapat dilepaskan dari posisi media dalam struktur ekonomi dan relasinya dengan kebijakan publik. Model framing Entman memungkinkan peneliti mengurai bagaimana masalah didefinisikan, siapa yang diposisikan sebagai pihak penyebab, bagaimana penilaian moral dibangun, serta solusi apa yang ditawarkan media dalam konteks tersebut.

Dengan demikian, keterkaitan antara framing, media online, berita, dan ekonomi politik media membentuk landasan teoritis penelitian ini. Analisis framing Entman digunakan untuk mengidentifikasi pola pembingkai isu thrifting, sementara perspektif ekonomi politik media membantu menjelaskan faktor-faktor struktural yang memengaruhi perbedaan framing antar media.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini adalah Analisis Framing Pemberitaan Larangan Thrifting pada Media Batampos.co.id dan Batamnews.co.id (Builalaq & Abidin, 2022). Penelitian tersebut menganalisis bagaimana dua media online lokal membingkai kebijakan larangan impor pakaian bekas setelah diberlakukan di Batam. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan observasi, penelitian ini menunjukkan

bahwa media lokal memiliki kecenderungan tertentu dalam membangun narasi kebijakan, baik dengan menekankan aspek penegakan hukum maupun dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu tersebut relevan karena sama-sama menggunakan analisis framing untuk mengkaji pemberitaan *thrifting* sebagai isu kebijakan publik. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar, yaitu fokus pada media nasional dan media nasional-populer dengan karakter editorial yang berbeda, serta secara spesifik mengkaji pernyataan Menteri Keuangan Purbaya sebagai aktor sentral kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menghadirkan perspektif ekonomi politik media dan membandingkan framing media pada level nasional, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pemetaan wacana *thrifting* di media daring Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Entman. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada upaya memahami konstruksi makna yang dibangun media melalui teks berita, sehingga menuntut proses interpretasi yang mendalam terhadap struktur dan isi pemberitaan (Mayang Safitri, 2024). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana media memilih, menonjolkan, dan mengarahkan makna tertentu melalui bahasa, narasi, serta sudut pandang yang digunakan dalam membingkai isu penolakan legalisasi *thrifting* oleh Menteri Keuangan Purbaya (Sumilih et al., 2025).

Untuk menjaga objektivitas analisis dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan kerangka analisis yang sistematis dan konsisten, yaitu model framing Entman yang memiliki kategori analitis yang jelas dan terstruktur. Proses analisis dilakukan dengan berpegang pada indikator konseptual dari setiap elemen framing, sehingga penafsiran tidak didasarkan pada opini personal peneliti, melainkan pada bukti tekstual yang muncul secara eksplisit maupun implisit dalam teks berita. Dengan demikian, objektivitas dijaga melalui penggunaan teori yang mapan, prosedur analisis yang transparan, serta pembacaan teks secara berulang dan konsisten.

Objek penelitian ini adalah enam artikel berita dari dua media daring nasional, yakni CNN Indonesia dan Inilah.com. Pemilihan enam artikel tersebut dilakukan secara purposif dengan kriteria tertentu. Masing-masing media dipilih tiga artikel karena jumlah tersebut dinilai representatif untuk menangkap pola framing yang konsisten tanpa mengabaikan kedalaman analisis teks. Fokus penelitian bukan pada kuantitas berita, melainkan pada intensitas makna dan konsistensi konstruksi wacana yang dibangun oleh masing-masing media. Rentang waktu November 2025 dipilih karena periode tersebut merupakan puncak intensitas pemberitaan terkait pernyataan Menkeu Purbaya mengenai larangan *thrifting*, sehingga memungkinkan analisis framing dilakukan dalam konteks isu yang masih aktual, utuh, dan belum mengalami pergeseran wacana yang signifikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri artikel pada portal resmi CNN Indonesia dan Inilah.com menggunakan kata kunci yang relevan dengan isu *thrifting* dan pernyataan Menkeu Purbaya. Artikel kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, fokus utama pada kebijakan larangan *thrifting*, serta kedekatan waktu publikasi. Data pendukung berupa regulasi terkait larangan impor pakaian bekas, pernyataan resmi pemerintah, dan konteks sosial-ekonomi *thrifting* turut digunakan untuk memperkuat pemahaman dan analisis.

Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Pertama, triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil analisis framing dengan konsep dan temuan penelitian terdahulu terkait framing media dan kebijakan publik. Kedua, triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokkan narasi media dengan dokumen resmi seperti

peraturan impor pakaian bekas dan pernyataan otoritas negara, sehingga interpretasi tidak hanya bertumpu pada teks media semata. Ketiga, triangulasi peneliti dilakukan melalui diskusi terbatas dengan rekan sejawat atau dosen pembimbing untuk menguji konsistensi dan kewajaran interpretasi terhadap teks berita, guna meminimalkan bias subjektif.

Analisis data dilakukan menggunakan model framing Entman yang mencakup empat fungsi utama, yaitu pendefinisian masalah (define problems), diagnosis penyebab (diagnose causes), penilaian moral (make moral judgments), dan rekomendasi penyelesaian (treatment recommendation) (Entman, 1993). Setiap artikel dianalisis dengan mengidentifikasi diksi, struktur narasi, penonjolan aktor, serta arah wacana yang dominan. Hasil analisis kemudian dibandingkan antar media untuk mengungkap perbedaan dan persamaan pola framing yang digunakan CNN Indonesia dan Inilah.com dalam mengonstruksi isu penolakan legalisasi thrifting.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis framing yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sekaligus memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran media daring dalam membentuk realitas sosial terkait isu kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a) Identifikasi berita 1 CNN Indonesia

Judul : Purbaya soal Penjual Thrifting Siap Bayar Pajak: Ilegal, Saya Tangkap
Tangkap
Sumber : cnnindonesia.com (CNN Indonesia, 2025c)
Tanggal pemuatan : 20 November 2025

Purbaya soal Penjual Thrifting Siap
Bayar Pajak: Ilegal, Saya Tangkap

CNN Indonesia

Kamis, 20 Nov 2025 15:21 WIB



Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merespons permintaan sebagian pedagang baju bekas (thrifting) yang ingin aktivitasnya dilegalkan dengan membayar pajak. (CNN Indonesia/Sakti Darma Abhiyoso).

Gambar 1 Purbaya soal Penjual Thrifting Siap Bayar Pajak: Ilegal, Saya Tangkap
Sumber: (CNN Indonesia, 2025c)

“Menteri Keuangan Purbaya menolak usulan pedagang thrifting yang ingin aktivitasnya dilegalkan dengan membayar pajak. Ia menegaskan bahwa persoalan thrifting bukan soal pajak, tetapi soal legalitas barang impor bekas yang masuk tanpa izin. Purbaya menyatakan tidak ada kompromi: barang ilegal akan dihentikan dan pelakunya ditindak. Ia menilai impor pakaian bekas merugikan struktur ekonomi domestik dan menekan usaha lokal. Menurutnya, pedagang bisa beralih menjual produk lokal. Sementara itu, Adian Napitupulu dan pedagang Rifai Silalahi meminta pemerintah mempertimbangkan legalisasi karena 7,5 juta orang bergantung pada bisnis thrifting, dan kontribusinya hanya 0,5% dari total tekstil ilegal.”

Define Problems

Masalah didefinisikan sebagai masuknya barang impor bekas secara ilegal yang dianggap mengancam ekonomi nasional dan melanggar hukum.

Diagnoses Causes

Penyebab diarahkan pada praktik impor ilegal yang dilakukan pedagang dan pihak tertentu, serta ketergantungan pasar pada barang asing.

Make Moral Judgements

Purbaya menilai bahwa barang ilegal tetap salah, terlepas dari kebutuhan pedagang atau potensi pajak. Mengizinkan thrifting dianggap tidak etis karena merugikan pelaku usaha lokal. Pedagang dan Adian menilai moralitas terletak pada melindungi mata pencaharian masyarakat.

Treatment Recommendation

Pemerintah: hentikan thrifting ilegal, dorong pedagang beralih ke produk lokal.

Pedagang: legalisasi atau beri regulasi terbatas agar 7,5 juta pekerja tetap memiliki sumber pendapatan.

Framming Summary

Artikel membingkai pemerintah sebagai pihak yang tegas menjaga legalitas dan ekonomi nasional, sementara pedagang digambarkan terdesak namun tetap berharap legalisasi. Fokus narasi lebih condong pada ketegasan negara.

b) Identifikasi berita 2 CNN Indonesia

Judul : Aturan Impor Baju Bekas di Tengah Upaya Purbaya Berantas 'Thrifting'

Sumber : cnnindonesia.com (CNN Indonesia, 2025a)

Tanggal Pemuatan : 09 November 2025

Aturan Impor Baju Bekas di Tengah Upaya Purbaya Berantas 'Thrifting'

agm | CNN Indonesia

Minggu, 09 Nov 2025 09:10 WIB



Gambar 2. Aturan Impor Baju Bekas di Tengah Upaya Purbaya Berantas 'Thrifting'
Sumber: (CNN Indonesia, 2025a)

“Purbaya berkomitmen memberantas peredaran pakaian bekas impor yang dinilai merugikan industri tekstil lokal. Pemerintah akan memperkuat aturan larangan impor pakaian bekas ilegal dan menambah sanksi berupa denda bagi importir yang melanggar.”

Define Problems

Masalahnya adalah banyaknya pakaian bekas impor ilegal yang membanjiri pasar dan merugikan industri lokal.

Diagnoses Causes

Penyebab diposisikan pada importir ilegal yang membawa barang masuk tanpa izin dan lemahnya penegakan aturan.

Make Moral Judgements

Pemerintah digambarkan mengambil langkah moral untuk melindungi industri domestik, sehingga pemberantasan thrifting ilegal dianggap tindakan benar.

Treatment Recommendation

Memperketat aturan larangan impor, memperberat sanksi, dan menindak importir nakal.

Framming Summary

Artikel membingkai thrifting sebagai ancaman industri nasional dan menampilkan Purbaya sebagai figur yang memperkuat regulasi demi melindungi sektor industri tekstil.

c) Identifikasi berita 3 CNN Indonesia

Judul : BAM DPR Minta Pemerintah Jangan Asal Tindak Penjual Thrifting
Sumber : cnnindonesia.com (CNN Indonesia, 2025b)
Tanggal Pemuatan : 20 November 2025

BAM DPR Minta Pemerintah Jangan Asal Tindak Penjual Thrifting

CNN Indonesia

Kamis, 20 Nov 2025 11:27 WIB



Politisi PDIP yang juga anggota DPR Adian Napitupulu saat menemui massa demonstran di depan kompleks parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Gambar 3. BAM DPR Minta Pemerintah Jangan Asal Tindak Penjual Thrifting
Sumber: (CNN Indonesia, 2025b)

“Adian Napitupulu meminta pemerintah tidak gegabah menindak pedagang thrifting karena banyak warga menggantungkan hidup dari usaha tersebut. Ia menilai klaim ilegal tidak cukup sebagai dasar penindakan, karena beberapa sektor lain seperti ojol juga belum diatur UU. Data menunjukkan thrifting hanya 0,5% dari total tekstil ilegal. Pedagang Rifai meminta legalisasi karena thrifting menjadi sumber nafkah 7,5 juta orang dan telah menjadi budaya serta tren sejak lama. Artikel juga menjelaskan sejarah thrifting sebagai gerakan sosial, bukan sekadar jual beli barang bekas.”

Define Problems

Masalah didefinisikan sebagai potensi hilangnya mata pencaharian masyarakat jika thrifting ditindak keras.

Diagnoses Causes

Penyebab diarahkan pada langkah penegakan hukum pemerintah yang dianggap terburu-buru dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Make Moral Judgements

Penilaian moral menekankan bahwa negara semestinya tidak menindak rakyat sebelum mampu menyediakan lapangan kerja. Thrifting juga diposisikan sebagai budaya, bukan sekadar ilegalitas.

Treatment Recommendation

Mendorong legalisasi atau regulasi, bukan penutupan; berikan kesempatan pedagang untuk tetap beroperasi.

Framming Summary

Framing artikel berpihak pada perspektif pedagang dan DPR, menonjolkan thrifting sebagai fenomena budaya dan sumber ekonomi masyarakat, sehingga negara seharusnya bersikap lebih bijak.

d) Identifikasi berita 4 Inilah.com

Judul : Menkeu Purbaya ‘Gembok’ Pintu Thrifting: Tak Ada Kompromi, Barang Ilegal Tetap Ilegal

Sumber : inilah.com (Suryakusumah, 2025)

Tanggal Pemuatan : 20 November 2025



Gambar 4. Menkeu Purbaya ‘Gembok’ Pintu Thrifting: Tak Ada Kompromi, Barang Ilegal Tetap Ilegal
Sumber: (Suryakusumah, 2025)

“Purbaya menegaskan tidak ada kompromi untuk melegalkan thrifting. Ia menyatakan bahwa barang ilegal tidak bisa menjadi legal hanya dengan membayar pajak. Purbaya menekankan pentingnya nasionalisme ekonomi dan perlindungan pasar lokal dari barang asing. Ia menilai pedagang thrifting seharusnya beralih menjual produk lokal yang kualitasnya tidak kalah.”

Define Problems

Serbuan barang bekas impor ilegal yang mengancam industri domestik.

Diagnoses Causes

Arus impor ilegal dan pedagang yang tetap bergantung pada barang selundupan.

Make Moral Judgements

Legalitas diprioritaskan: barang ilegal tidak bisa ditoleransi. Ditekankan pula nilai moral nasionalisme ekonomi.

Treatment Recommendation

Tutup total impor ilegal, hentikan thrifting selundupan, dan alihkan pedagang ke produk lokal.

Framming Summary

Artikel membingkai Purbaya sebagai figur “tangan besi” yang mengutamakan hukum dan kepentingan industri dalam negeri; pedagang thrifting tidak diberikan ruang legitimasi.

e) Identifikasi berita 5 Inilah.com

Judul : Purbaya Jawab Keluhan Pedagang Thrifting: Kalau Ganja Dipajaki Jadi Legal?

Sumber : inilah.com (Scholastica, 2025b)

Tanggal Pemuatan : 21 November 2025



Gambar 5. Purbaya Jawab Keluhan Pedagang Thrifting: Kalau Ganja Dipajaki Jadi Legal?

Sumber: (Scholastica, 2025b)

“Purbaya menolak gagasan bahwa pembayaran pajak dapat membuat thrifting menjadi legal. Ia menegaskan barang bekas impor tetap ilegal meski pedagang siap membayar pajak. Ia memberikan analogi bahwa ganja tetap ilegal meski dipajaki. Pedagang Rifai menyebut jutaan orang menggantungkan hidup pada thrifting dan berharap legalisasi atau setidaknya aturan kuota impor terbatas.”

Define Problems

Permintaan legalisasi thrifting yang bertentangan dengan undang-undang.

Diagnoses Causes

Pandangan pedagang bahwa pajak bisa mengubah status ilegal menjadi legal, serta keberadaan impor barang bekas yang dilarang.

Make Moral Judgements

Purbaya menilai secara moral bahwa legalitas tidak bisa dinegosiasikan, dan analogi ganja memperkuat posisi tersebut. Pedagang menekankan moralitas pada hak hidup dan nafkah jutaan keluarga..

Treatment Recommendation

Pemerintah: bersihkan pasar dari barang ilegal.

Pedagang: legalisasi atau kuota terbatas agar usaha tetap hidup.

Framming Summary

Artikel membingkai konflik sebagai pertentangan antara ketegasan hukum negara dan kebutuhan ekonomi pedagang, dengan narasi yang tetap menonjolkan posisi pemerintah.

f) Identifikasi berita 6 Inilah.com

Judul : Menkeu Purbaya Bakal Eksekusi Langsung Mafia Thrifting Ilegal yang Hargai Satu Kontainer Rp550 Juta

Sumber : inilah.com (Scholastica, 2025a)

Tanggal Pemuatan : 20 November 2025



Gambar 6. Menkeu Purbaya Bakal Eksekusi Langsung Mafia Thrifting Ilegal yang Hargai Satu Kontainer Rp550 Juta
Sumber: (Scholastica, 2025a)

“Pedagang Rifai mengungkapkan adanya praktik pungli dan mafia yang menguasai penyelundupan thrifting, dengan harga satu kontainer mencapai Rp550 juta. Purbaya meminta bukti dan berjanji akan menindak tegas bila temuan itu benar, termasuk jika oknum Bea Cukai terlibat. Ia menyatakan DJBC kini tidak berani lagi bermain-main. Pedagang kembali meminta legalisasi agar tidak terjebak dalam rantai ilegalitas dan agar pungli dapat dihentikan.”

Define Problems

Praktik mafia penyelundupan thrifting yang merugikan negara, termasuk adanya pungli besar.

Diagnoses Causes

Penyebab diarahkan kepada oknum dan jaringan ilegal dalam penyelundupan, bukan semata pedagang.

Make Moral Judgements

Pemerintah menilai mafia sebagai tindakan kriminal yang tidak bisa dibiarkan; pedagang ingin keluar dari sistem ilegal yang merugikan mereka dan negara.

Treatment Recommendation

Pemerintah: investigasi, klarifikasi, tindak tegas mafia dan oknum Bea Cukai.

Pedagang: legalisasi agar penyelundupan berhenti dan rantai ilegal terputus.

Framming Summary

Artikel membingkai Purbaya sebagai pembasmi mafia dan pedagang sebagai pihak yang ingin legalisasi untuk menghindari pungli. Fokus framing berada pada kriminalitas jaringan penyelundupan.

Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap enam artikel yang berasal dari CNNIndonesia.com dan Inilah.com, ditemukan bahwa kedua media sama-sama menempatkan isu thrifting dalam kerangka legalitas impor dan perlindungan ekonomi nasional. Namun demikian, perbedaan mencolok muncul pada cara masing-masing media menarasikan aktor, intensitas moralitas, serta pilihan diksi yang digunakan dalam membangun realitas sosial terkait kebijakan pemerintah.

CNNIndonesia.com cenderung menghadirkan isu thrifting sebagai persoalan kebijakan publik yang kompleks dan multiaktor. Dalam ketiga artikelnya, CNN tidak hanya menonjolkan sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait ilegalitas thrifting, tetapi juga memberikan ruang yang relatif seimbang bagi suara DPR dan pedagang. Dengan menghadirkan data mengenai jumlah pekerja yang menggantungkan hidup pada thrifting serta proporsi thrifting yang hanya 0,5 persen dari total tekstil ilegal, CNN membingkai isu ini sebagai dilema antara kepatuhan hukum dan tanggung jawab negara terhadap ekonomi rakyat. Framing tersebut memperlihatkan pemerintah sebagai aktor berwenang, namun tetap terbuka terhadap kritik dan dialog.

Sebaliknya, Inilah.com secara konsisten membangun narasi yang lebih tegas dan konfrontatif. Pilihan diksi seperti “gembok”, “tak ada kompromi”, “tangan besi”, hingga “mafia thrifting” menunjukkan orientasi framing yang menekankan urgensi penegakan hukum dan ancaman kriminalitas. Dalam artikel-artikelnya, Purbaya dikonstruksikan sebagai figur kuat yang berperan sebagai penjaga kedaulatan ekonomi nasional. Pedagang thrifting tidak sepenuhnya dihapus dari narasi, tetapi kehadirannya lebih sering diposisikan sebagai bagian dari sistem ilegal yang harus dibersihkan, bukan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan kebijakan.

Analisis Kritis Perbandingan Framing

Perbedaan framing antara CNNIndonesia.com dan Inilah.com tidak terlepas dari orientasi redaksional masing-masing media. CNN cenderung menggunakan gaya dialogis dan argumentatif dengan menghadirkan berbagai sudut pandang yang saling berhadapan. Pendekatan ini memungkinkan pembaca melihat isu thrifting sebagai persoalan struktural yang melibatkan negara, pelaku usaha kecil, serta sistem regulasi yang belum sepenuhnya adaptif. Dengan demikian, framing CNN berfungsi membuka ruang diskursus publik, bukan sekadar menegaskan posisi benar-salah.

Sementara itu, Inilah.com menggunakan gaya penulisan yang lebih dramatis dan persuasif. Narasi “tangan besi” mencerminkan upaya media tersebut untuk menegaskan citra negara yang kuat dan tidak ragu dalam menindak pelanggaran hukum. Gaya ini berpotensi membangun legitimasi publik terhadap tindakan represif pemerintah, namun pada saat yang sama mengurangi ruang empati terhadap dimensi sosial-ekonomi pedagang kecil. Penggunaan istilah “mafia” secara berulang memperkuat kesan bahwa thrifting identik dengan kriminalitas terorganisir, sehingga aspek ekonomi rakyat yang bergantung pada sektor ini menjadi tersisih dari perhatian utama.

Pendalaman analisis moral menunjukkan bahwa CNNIndonesia.com mengonstruksi moralitas kebijakan dalam kerangka keadilan sosial dan kehati-hatian negara. Negara digambarkan tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga memastikan kebijakan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Sebaliknya, Inilah.com menempatkan moralitas pada supremasi hukum dan nasionalisme ekonomi. Dalam kerangka ini, segala bentuk kompromi terhadap barang ilegal diposisikan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional, meskipun berdampak pada mata pencaharian masyarakat.

Implikasi terhadap Penerimaan Publik

Framing yang berbeda ini berpotensi memengaruhi cara publik menerima dan menilai kebijakan pemerintah. Framing dialogis ala CNNIndonesia.com memungkinkan publik melihat kebijakan penertiban *thriftling* sebagai isu yang masih dapat dinegosiasikan melalui regulasi yang lebih adil dan inklusif. Sebaliknya, framing dramatis Inilah.com cenderung mendorong publik untuk menerima kebijakan penindakan secara lebih cepat, karena kebijakan tersebut dibingkai sebagai langkah darurat untuk memberantas kejahatan dan menyelamatkan negara dari kerugian besar.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk legitimasi kebijakan publik. Ketika media menekankan aspek kriminalitas dan ancaman negara, publik cenderung mendukung kebijakan represif. Sebaliknya, ketika media menonjolkan dimensi sosial dan ekonomi rakyat, publik lebih terdorong untuk mempertanyakan kebijakan dan menuntut solusi yang lebih manusiawi.

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini menegaskan kembali relevansi model framing Entman dalam menganalisis bagaimana media mengonstruksi realitas sosial melalui seleksi isu, aktor, dan nilai moral. Penelitian ini juga memperluas pemahaman bahwa framing tidak hanya bekerja pada level isi, tetapi juga pada gaya penyampaian dan intensitas narasi. Dengan demikian, framing media dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi kebijakan maupun sebagai ruang deliberasi publik.

Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya tanggung jawab media dalam menyajikan isu kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Media diharapkan tidak hanya menekankan aspek legalitas dan penindakan, tetapi juga menghadirkan konteks sosial yang memadai agar publik memperoleh gambaran yang utuh. Bagi pemerintah, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan melalui media. Pendekatan komunikasi yang transparan dan solutif berpotensi meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan penertiban *thriftling*.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai polemik *thriftling* antara CNNIndonesia.com dan Inilah.com memiliki perbedaan framing yang cukup signifikan, yang berdampak pada cara publik memahami isu legalitas impor pakaian bekas dan respons pemerintah. CNNIndonesia.com membingkai *thriftling* sebagai isu yang kompleks, melibatkan aspek legalitas, ekonomi rakyat, serta kepentingan industri domestik. Media ini memberikan ruang yang lebih seimbang bagi berbagai aktor seperti pedagang, legislator, dan pemerintah sehingga menghasilkan konstruksi isu yang lebih dialogis dan kontekstual. Sementara itu, Inilah.com menonjolkan perspektif yang lebih

keras dan menekankan ilegalitas thrifting melalui fokus pada tindakan tegas pemerintah, narasi pemberantasan mafia, dan urgensi penegakan hukum.

Melalui analisis framing Entman, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan media dalam mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi sangat dipengaruhi oleh orientasi redaksional dan karakter audiens masing-masing. CNNIndonesia.com cenderung mengangkat kompleksitas sosial-ekonomi dan dilema kebijakan publik, sedangkan Inilah.com menegaskan supremasi hukum dan perlindungan ekonomi nasional. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa framing tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga membentuk ruang tafsir yang dapat mengarahkan opini publik pada arah tertentu.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun persepsi terhadap kebijakan pemerintah dan aktor yang terlibat di dalamnya. Karena itu, keberimbangan, sensitivitas terhadap kepentingan kelompok rentan, serta akurasi narasi menjadi aspek penting dalam produksi berita. Temuan ini juga memperkuat urgensi literasi media agar publik mampu memahami perbedaan konstruksi informasi dan tidak terjebak pada framing yang tidak utuh. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai bagaimana isu ekonomi rakyat seperti thrifting dapat dibentuk secara berbeda oleh masing-masing media serta implikasinya terhadap wacana kebijakan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D. P. A., Widawara, R. Y., & Kariana, I. N. P. (2025). Analisis Framing Berita Nasional Kompas. com dan Lokal Lombokpost. jawapos. com dalam Pemberitaan Kasus Juliana WNA Brasil di Rinjani. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(4), 1292–1305.
- Builalaq, V., & Abidin, S. (2022). *ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LARANGAN THRIFTING PADA MEDIA BATAMPOS . CO . ID DAN BATAMNEWS . CO . ID*.
- CNN Indonesia. (2025a). *Aturan Impor Baju Bekas di Tengah Upaya Purbaya Berantas 'Thrifting.'* Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251109002102-96-1293462/aturan-impor-baju-bekas-di-tengah-upaya-purbaya-berantas-thrifting>
- CNN Indonesia. (2025b). *BAM DPR Minta Pemerintah Jangan Asal Tindak Penjual Thrifting.* Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251120105412-32-1297441/bam-dpr-minta-pemerintah-jangan-asal-tindak-penjual-thrifting>
- CNN Indonesia. (2025c). *Purbaya soal Penjual Thrifting Siap Bayar Pajak: Ilegal, Saya Tangkap.* Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251120145417-532-1297553/purbaya-soal-penjual-thrifting-siap-bayar-pajak-ilegal-saya-tangkap>
- Dhinanti, M., Nuranik, D. A., Azka, R., & Nazhif, M. N. (2024). Industrialisasi Media Massa Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Berita: Studi Media Online Tempo Dan Kompas. *Merdeka Indonesia Jurnal International*, 4(2), 405–420.
- Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of A Fractured Paradigm. *The Journal of Communication*, 43, 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>

- Farhanudin, M., Zulkarnain, M. I., Priyawan, A. D., Kamaludin, M., Oktavia, D. R., Harefa, I., & Kusumadinata, A. A. (2025). *SERBA-SERBI JURNALISTIK MODERN*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Ikhwan, M. (2022). *Manajemen Media Kontemporer: Mengelola Media Cetak, Penyiaran, dan Digital*. Prenada Media.
- Irawan, F. (2023). *KONTRUKSI REPUBLIKA ONLINE PADA PEMBERITAAN KEBAKARAN DEPO PERTAMINA PLUMPANG 3 MARET 2023*. Universitas Nasional.
- Ketindan, B. (2025). Adi Nugroho.(2023). Etika jurnalistik dan demokrasi: Perspektif organisasi profesi. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI). ANTARA News.(2024). Laporan tahunan Dewan Pers 2023: 813 pengaduan masyarakat. *Jurnalistik (Teori Dan Teknik Penyusunan Berita)*, 97.
- Lestari, M. A. D., Prasetyo, M. G., Hasan, M. S., & Aqilah, N. S. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Bisnis: Studi Kasus Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terhadap Pengusaha Thrifting. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 324–331.
- Mansyurin, M. R., & Apriani, R. (2024). PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERNIAGAAN PAKAIAN BEKAS IMPOR PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 12(2).
- Mayang Safitri, M. (2024). *Analisis Framing Pemberitaan Mas Dhito Pada Media Online Keditangguh.co dan Radar Kediri pada Bulan Mei-Juli 2024*.
- Pamuji, E. (2019). *Media cetak vs media online*. Unitomo Press.
- Scholastica, C. A. (2025a). *Menkeu Purbaya Bakal Eksekusi Langsung Mafia Thrifting Ilegal yang Hargai Satu Kontainer Rp550 Juta*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/menkeu-purbaya-bakal-eksekusi-langsung-mafia-thrifting-ilegal-yang-hargai-satu-kontainer-rp550-juta>
- Scholastica, C. A. (2025b). *Purbaya Jawab Keluhan Pedagang Thrifting: Kalau Ganja Dipajaki Jadi Legal?* Inilah.Com. <https://www.inilah.com/purbaya-jawab-keluhan-pedagang-thrifting-kalau-ganja-dipajaki-jadi-legal>
- Sumilih, D. A., Jaya, A., Fitriyaningsih, A. D. R., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Irawan, E. P., Dirna, F. C., Rachmaningtyas, N. A., Ras, A., Pujiriyani, D. W., & Setyorini, N. (2025). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Suryakusumah, I. (2025). *Menkeu Purbaya 'Gembok' Pintu Thrifting: Tak Ada Kompromi, Barang Ilegal Tetap Ilegal*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/menkeu-purbaya-gembok-pintu-thrifting-tak-ada-kompromi-barang-ilegal-tetap-ilegal>
- Syafitri, C. Z. L. (2025). Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Kesadaran Konsumtif Generasi Z melalui Tren Thrifting sebagai Gaya Hidup Berkelanjutan. *PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI)*, 11(1).